

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II			
1	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Risiko Bencana	Bahaya (hazard) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Untuk data tentang kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Kepala Badan
		Indikator Kinerja Program (esselon III)			
NO	SasaranProgram	Indikator Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan pengurangan resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	IKD adalah <i>instrument</i> untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah, adalah komponen penyusun Indeks	KAJIAN KAPSITAS INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) Kapasitas terdiri dari : 7 fokuss prioritas 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan 2. Pengkajian risiko dan pemcanaan terpadu 3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistic 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			Resiko Bencana yang merupakan IKU BPBD	7. Pengembangan system pemulihan bencana 71 indikator pencapaian : Rentang nilai ketahanan 1-5 Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0-1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah sebagai berikut: - Indeks <=0,4 adalah rendah - Indeks 0,4-0,8 adalah sedang - Indeks 0,8-1 adalah tinggi	
2.	Meningkatnya penanganan darurat bencana yang cepat dan disertai dukungan logistik yang terencana dan terukur	Presentase penanganan darurat bencana	Capaian realisasi penanganan kedaruratan bencana	$\frac{\text{Penanganan Kedaruratan Bencana}}{\text{Kejadian Bencana}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3.		Prosentase bantuan logistik dan dukungan peralatan penanggulangan bencana	Capaian prosentase ketersediaan bantuan logistik terhadap kejadian bencana yang ditangani	$= \frac{\text{realisasi ketersediaan peralatan dan logistik}}{\text{target pada saat bencana}} \times 100$	
4.	Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana secara tekoordinir, terpadu, terarah dan terukur	Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Capaian prosentase koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi yang ditangani terhadap seluruh objek terdampak	$= \frac{\text{realisasi koordinasi rehabilitasi pemulihan kondisi sosial ekonomi}}{\text{target koordinasi pada saat bencana}} \times 100$	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi